

Karawang tak Punya Rencana Kontingensi

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Karawang per 25 Februari 2020, pukul 20.00 WIB, dari jumlah warga yang terdampak di kabupaten sebanyak 3.111 KK atau 9.770 jiwa mengungsi. "Banjir dipicu oleh berbagai faktor, seperti intensitas hujan tinggi di wilayah Karawang, drainase yang buruk serta sumbatan sampah pada sipon. Dalam bahasa teknik, sipon adalah saluran sungai yang dibangun di bawah permukaan sungai," kata Agus Wibowo, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (26/2).

BPBD Karawang dibantu dengan dengan instansi terkait dengan dengan instansi lainnya telah melakukan upaya evakuasi sejak Senin (24/2) lalu. Tenda dan dapur umum dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum mereka yang mengungsi. Selain itu, mereka juga menerima bantuan logistik permakanan dan selimut. Pendataan sementara kerugian materiil yaitu 14.808 unit rumah yang terendam banjir, 3 masjid, 1 sekolah dan 842 hektar sawah. Perkiraan nilai kerugian senilai Rp 179 juta. "Bupati Karawang telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam tidak hanya banjir, tetapi juga longsor dan angin puting beliung. Status ini berlaku pada periode 14 hari, terhitung sejak 26 Februari 2020 hingga 10 Maret 2020," jelasnya.

Banjir di Karawang setiap tahun selalu terjadi, sayangnya

bencana ini tidak diperhitungkan dengan matang oleh Pemkab Karawang. Hal ini bisa dilihat dari belum adanya rencana kontingensi yang dimiliki pemda. Padahal, hal ini penting dalam mempersiapkan menghadapi segala kemungkinan risiko bencana pada suatu daerah. "Kita belum membuat, ini BPBD-nya belum membuat contingency planing, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan jajaran forkopimda, dengan OPD terkait," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, Rabu (26/2), usai bertemu dengan Kepala BNPB Doni Manardo.

Acep menjanjikan perencanaan kontingensi berkaitan dengan penanganan bencana secara preventif akan dibentuk dengan sistem yang baik. Adapun langkah recovery yang dilakukan oleh Pemkab Karawang pasca banjir yang melanda 15 kecamatan sejak 24 Februari kemarin dikatakannya tengah berjalan. Menurutnya, hal ini bisa dilihat dengan upaya normalisasi sungai dan penanggulangan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Karawang. "Ada penanggulngan bencana, dan nanti ada pasca, recovery. Itu (recovery) ada yang dikerjakan oleh pemda ada yang dikerjakan oleh kementerian. Kalau pemda sudah siap semua OPD terkait, termasuk unsur TNI dan Polri," terangnya.

Di tempat yang sama Kepala

BNPB Doni Manardo mengatakan presiden telah mewajibkan kepala daerah untuk membentuk perencanaan kontingensi. Setiap daerah harus mengetahui potensi bencana apa yang mengancam dan bagaimana melakukan pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. "Sehingga kalau terjadi, kerugian harta benda dan korban jiwa seminimal mungkin," paparnya.

Pihaknya mendorong perencanaan kontingensi ini harus terintergrasi, dalam artian pemerintahan daerah, kepolisian dan TNI tidak bergerak sendiri-sendiri dalam perencanaan kontingensi ini. Saat terjadi bencana, setiap lembaga baik milik daerah maupun pusat yang berada di daerah dapat saling melengkapi. "Beberapa daerah sudah memulai, sudah ada yang kirim tim ke BNPB, sudah ada juga yang minta bantuan konsultan dari beberapa pakar," ucapnya. Doni menegaskan, pentingnya perencanaan kontingensi ini mengingat Indonesia termasuk negara dengan ancaman bencana tertinggi di dunia. Hampir semua jenis ancaman bencana ada di Indonesia seperti gempa, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang ekstrem. "Tambah lagi sekarang ini virus, ini kita semuanya harus saling mendukung, saling bahu-membahu," tutupnya. (cr5)